

**2023**



**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
(PERUBAHAN RENJA)**

---

**DINAS  
LINGKUNGAN  
HIDUP**

KABUPATEN SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

**DLH**  
Satu Hati Jaga Bumi



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 31 Juli 2023



BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 31 Juli 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 31



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Jajaway Telepon (0266) 436428  
Fax. (0266) 436427 Website : dlh.sukabumikab.go.id E-mail : blh@sukabumikab.go.id  
Palabuhanratu - Sukabumi 43364

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 000.7.2.4/2861/Sekret/2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang disusun setiap tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  - 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
- 28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 30) Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 114);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaal Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025 ((Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13)

- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
- 38) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 77);
- 39) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3);
- 40) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 - 2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi serta penganggaran Tahun 2023.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

Kepala Dinas,



**IR. H. TEJA SUMIRAT, M.M**

Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19660330 199303 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi 2023 ini dengan baik dan lancar.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun sebagai acuan/arahan kerangka kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat berjalan optimal, efektif dan efisien. Dalam penyusunannya mengacu atau berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Demikian rencana kerja ini disusun. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Palabuhanratu, 18 Agustus 2023

KEPALA,



**Ir. Hj. TEJA SUMIRAT, M.M**  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19660330 199303 2 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
BAB II.....	9
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	9
BAB III.....	18
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	18
BAB IV .....	33
PENUTUP .....	33

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Penyusunan Renja mendorong dapat kebijakan perangkat daerah untuk membuat formulasi dan implementasi serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya akselerasi program pembangunan untuk mewujudkan tema/fokus pembangunan pada “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Inklusif berbasis Sektor Unggulan Daerah yang Berkelanjutan”. Konsep pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian perlu adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan konkrit sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi dapat berlangsung secara berdayana guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, mengacu pada Pasal 343 poin (1) Dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan apabila dalam hasil evaluasinya terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan daerah. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD termuat dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, hal tersebut dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja DLH Kabupaten Sukabumi 2023 berlandaskan:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
  - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
  - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 27) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
  - 28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
  - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 114);
  - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 33) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025 ((Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13)
  - 34) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
  - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
  - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
  - 37) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
  - 38) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 77);

- 39) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3);
- 40) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 31).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah:

- a. Sebagai penjabaran tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju.
- b. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah:

- a. Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Untuk memudahkan penilaian dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja DLH dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra DLH merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH Kabupaten Sukabumi pada tahun berjalan yaitu 2023. DLH Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 melaksanakan 10 program utama dan 1 program penunjang dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi melalui pencapaian target kinerja sasaran DLH Tahun 2023. Berikut ini realisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian sampai keadaan bulan Juni 2023:





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
												K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%										
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara	Lokasi	20	18.000.000.000	17	243.924.900	17	310.000.000	17	46.015.800	17	72.738.750	17	118.754.550	17	362.679.450	0	2,01		
			<b>Sub Kegiatan</b>																				
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok.	57	7.440.000.000	31	80.304.000	31	100.000.000	31	1.100.400	31	2.989.800	31	4.090.200	31	84.394.200	0	1,13		
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dok.	5	1.750.000.000	1	7.120.900	1	10.000.000	1	4.788.800	1	1.345.350	1	6.134.150	1	13.255.050	0	0,76		
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dok.	3250	8.810.000.000	488	156.500.000	600	200.000.000	146	40.126.600	103	68.403.600	249	108.530.200	249	265.030.200	7,66	3,01		
			<b>Kegiatan</b>																				
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditanggulangi	Lokasi	20	5.000.000.000	17	24.822.750	17	70.000.000	17	13.404.400	17	14.354.250	17	27.758.650	17	52.581.400	85,00	1,05		
			<b>Sub Kegiatan</b>																				
		2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	25	1.250.000.000	17	24.822.750	5	70.000.000	5	13.404.400	5	14.354.250	10	27.758.650	10	52.581.400	40,00	0,042		
			<b>Kegiatan</b>																				
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	Lokasi	20	10.000.000.000	17	18.292.600	17	20.000.000	17	2.471.000	17	4.938.650	34	7.409.650	34	25.702.250	0	0,003		
			<b>Sub Kegiatan</b>																				
		2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dok.	31	1.615.000.000	17	18.292.600	1	20.000.000	1	2.471.000	1	4.938.650	2	7.409.650	2	25.702.250	0	0,016		
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%	10	28.500.000.000	1,23	63.233.601	10	107.000.000	0	-	-	2.356.400	0	2.356.400	0	65.590.001	-	0,002		
			<b>Kegiatan</b>																				
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kehati yang terkelola	Lokasi	3	28.500.000.000	-	63.233.601	2	107.000.000	2	-	2	2.356.400	4	-	4	63.233.601	0	0,002		
			<b>Sub Kegiatan</b>																				
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dok.	4	8.500.000.000	-	63.233.601	1	66.500.000	0	-	0	-	0	-	0	63.233.601	0	0,007		
		2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	250	500.000.000			80	40.500.000	0	-	0	2.356.400								
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola	%	1,73	10.500.000.000	1,61	21.939.500	1,73	50.000.000	0,22	9.821.500	0,22	9.775.250	0,44	19.596.750	2,1	41.536.250	118	0,004		
			<b>Kegiatan</b>																				
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS LB3 yang disetujui	Unit	100	10.500.000.000	25	21.939.500	20	50.000.000	5	9.821.500	5	9.775.250	10	19.596.750	35	41.536.250	35	0,004		
			<b>Sub Kegiatan</b>																				
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	100	1.500.000.000	15	21.939.500	20	50.000.000	5	9.821.500	5	9.775.250	10	19.596.750	25	41.536.250	25	0,028		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33	15.500.000.000	3,44	38.775.660	4,33	84.142.000	0,37	8.392.900	0,37	10.964.300	0,74	19.357.200	4,18	58.132.860	96,53579677	0,38
			<b>Kegiatan</b>																		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	Usaha/ Kegiatan	160	15.500.000.000	132	38.775.660	145	84.142.000	145	8.392.900	145	10.964.300	290	19.357.200	422	58.132.860	263,75	0,38
			<b>Sub Kegiatan</b>																		
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dok.	500	6.425.000.000	60	14.162.400	70	29.142.000	8	-	9	5.000.400	17	5.000.400	77	19.162.800	15,4	0,30
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	100	7.440.000.000	92	24.613.260	75	55.000.000	11	8.392.900	18	5.963.900	29	14.356.800	121	38.970.060	121	0,52
		2.11.07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	%	100	8.500.000.000	33,33	19.377.500	100	50.000.000	0	1.550.000	0	9.367.000	100	10.917.000	100	30.294.500	100	0,36
			<b>Kegiatan</b>																		
		2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang dibina	Orang	2500	6.500.000.000	50	19.377.500	150	50.000.000	150	1.550.000	150	9.367.000	300	10.917.000	50	30.294.500	2	0,47
			<b>Sub Kegiatan</b>																		
		2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dok.	3	6.500.000.000	1	19.377.500	3	50.000.000	0	1.550.000	0	9.367.000	0	10.917.000	1	30.294.500	33,33333333	0,47
		2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	%	5	9.000.000.000	2,50	15.500.000	5	49.999.900	0,94	22.165.400	0,94	7.308.500	1,88	29.473.900	4,4	44.973.900	87,6	0,50
			<b>Kegiatan</b>																		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah individu/kelompok masyarakat yang dididik, dilatih dan mendapatkan penyuluhan lingkungan	Orang	1250	9.000.000.000	125	15.500.000	202	49.999.900	0	22.165.400	47	7.308.500	47	15.500.000	47,0	31.000.000	3,76	0,34
			<b>Sub Kegiatan</b>																		
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dok.	45	765.000.000	4	15.500.000	3	49.999.900	1	22.165.400	0	7.308.500	1	29.473.900	1,0	44.973.900	2,222222222	5,88
		2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%	1,2	4.000.000.000	0,23	19.824.350	1,2	100.000.000	0	3.500.000	0	9.315.700	0,0	12.815.700	0,0	32.640.050	0	0,82



1. Realisasi sasaran strategis yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan

Sasaran strategis utama Dinas Lingkungan Hidup yaitu **"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"** dan **"Meningkatnya Pengelolaan Sampah"**.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup didukung oleh 9 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.248.141.900 terealisasi sebesar Rp. 293.088.500 atau 23,48 %. Perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 sebesar 63,86 poin dari target 67,41 poin atau mencapai 94,7%. Perhitungan IKLH terdiri komponen nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang mana komponen tersebut nilai berkurang dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikarenakan pencemaran air oleh aktivitas domestik dan pelaku usaha, dan pencemaran udara oleh aktivitas kendaraan bermotor dan pelaku usaha, serta adanya perubahan tutupan lahan yang tidak terkendali. Pengukuran IKA dan IKU berdasarkan data hasil sampling laboratorium sedangkan IKTL berdasarkan pemotretan oleh citra terkait tutupan lahan. belum dapat dilakukan karena hasil pengujian laboratorium belum diterima.

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan sampah didukung oleh 1 program dengan anggaran sebesar terealisasi sebesar atau %. Perhitungan Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani dihitung dari data penduduk BPS tahun 2022 dan diproyeksikan ke tahun 2023 karena data BPS tahun 2023 semester 1 belum rilis. Perhitungan Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 sebesar 39,72% dari target 58,40% atau hanya 68%. Pencapaian target sasaran strategis ini didukung oleh 1 program dengan anggaran sebesar Rp. 8.459.429.500 terealisasi sebesar Rp. 3.481.906.070 atau 41,16%.

2. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

Target yang telah direncanakan dan ditetapkan merupakan target akhir tahun yang mana hasil akhir pencapaiannya baru akan diketahui setelah

selesainya akhir tahun berjalan karena akumulasi dari variabel yang dihitung secara keseluruhan di akhir tahun. Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- a. Belum meluasnya paradigma pembangunan berkelanjutan;
  - b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Belum efektifnya evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah;
  - d. Belum ada aksi strategis mengenai penanganan isu lingkungan secara terintegrasi;
  - e. Tingkat pemahaman OPD/PD tentang pentingnya kajian bidang lingkungan hidup seperti RPPLH, KLHS, dll belum merata;
  - f. Terbatasnya anggaran/biaya dalam melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap pengajuan Perizinan berusaha, penanganan pengaduan, pengawasan Perizinan berusaha, dll;
  - g. Minimnya data perizinan berusaha yang dikeluarkan OSS yang ditembuskan ke DLH;
  - h. Sarana dan prasarana pendukung untuk ke lapangan masih kurang seperti alat ukur pemantauan kualitas air, udara, dan tanah.
3. Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra perangkat daerah Mengacu pada proyeksi realisasi pencapaian kinerja pada semester pertama Tahun 2023, capaian program renstra Dinas Lingkungan Hidup pada semester pertama ini belum sesuai dengan harapan karena anggarannya terbatas dan tidak sesuai dengan renstra. Implikasi yang timbul terhadap tidak memenuhinya target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu adanya tidak tercapainya Jakstrada, penumpukan sampah, dan tercemarnya lingkungan serta turunnya citra Kepala Daerah karena pengelolaan sampah menjadi sorotan berbagai pihak.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut
- Restrukturisasi perencanaan program dan kegiatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai

- Pengendalian penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
- Penyusunan kebutuhan anggaran perubahan yang mendukung percepatan dan optimalisasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
- Koordinasi dengan berbagai pihak/stakeholders untuk menggali potensi program kegiatan yang mendukung pencapaian terget kinerja yang telah ditetapkan
- Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sampah di TPA menjadi RDF.

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

#### Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan DLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>103.347.939.638</b>	<b>29.600.096.434</b>	<b>35.050.038.290</b>								<b>387.145.550.000</b>		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase responden yang mendapat pelayanan urusan lingkungan hidup	%		%	100 %	100 %	<b>20.000.272.200</b>	<b>19.892.525.034</b>	<b>22.121.464.030</b>						100 %	<b>23.493.650.000</b>	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	<b>142.025.400</b>	<b>52.196.400</b>	<b>55.196.400</b>						14 Dokumen	<b>277.500.000</b>	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	<b>49.957.600</b>	<b>35.522.400</b>	<b>38.522.400</b>	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	2 Dokumen	<b>107.500.000</b>	
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	<b>15.000.000</b>	
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	<b>15.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
2.11.01.2.01.04		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	0	0	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	15.000.000
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	0	0	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	15.000.000
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	17.067.800	6.794.000	6.794.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	10 Laporan	65.000.000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000	9.880.000	9.880.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	3 Laporan	45.000.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12.681.500.000	8.160.184.784	9.645.284.880						3 dokumen	13.945.500.000
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	12.634.000.000	8.150.184.784	9.630.606.880	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	82 Orang/bulan	13.898.000.000
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	5.000.000	9.678.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis	Aparatur	1 Laporan	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			
		Keuangan Akhir Tahun SKPD									Semua Kelurahan			Pertanian dan Lingkungan			
2 11 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	10.000.000
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi BMD	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50.434.200	39.957.000	39.957.000					Aparatur	2 dokumen	175.000.000
2 11 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.066.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	75.000.000
2 11 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.368.200	34.957.000	34.957.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Laporan	100.000.000
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi administrasi kepegawaian	orang		orang	200 orang	200 orang	122.780.000	0	0					Aparatur	200 orang	530.000.000
2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	46.360.000	0	0	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	30 Orang	300.000.000
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana prasarana pendukung pengadministrasian umum yang disediakan	jenis		jenis	16 jenis	16 jenis	1.382.677.200	394.829.250	556.218.150						16 jenis	1.744.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Pakett	19.811.100	7.200.000	7.200.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Paket	35.000.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.041.595.100	130.319.050	192.446.950	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	7 Paket	1.078.000.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.078.000.000	43.058.200	59.153.200	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	3 Paket	113.750.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	49.000.000	74.000.000	96.000.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	4 Dokumen	62.500.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	62.500.000	9.750.000	13.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	50 Laporan	65.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	52.224.000	130.502.000	188.418.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	12 Laporan	75.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
2 11 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen10	1000 Dokumen10	77.758.000	0	0	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1000 Dokumen10	165.000.000	
2 11 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	0	0	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	150.000.000	
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang yang diadakan	jenis		jenis	11 jenis	1 jenis	355.225.000	41.000.000	41.000.000					1 jenis	705.000.000	
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	70.000.000	41.000.000	41.000.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Unit	105.000.000	
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang pelayanan umum yang disediakan	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	4.431.918.400	10.306.277.600	10.439.327.600					7 jenis	4.666.400.000	
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	239.040.000	206.020.000	206.020.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	12 Laporan	266.400.000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				110 Laporan	110 Laporan	4.192.878.400	10.100.257.600	10.233.307.600	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	110 Laporan	4.400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang yang dipelihara	jenis		jenis	90 jenis	90 jenis	815.780.000	898.080.000	1.344.480.000					90 jenis	1.250.000.000	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	592.660.000	505.580.000	600.980.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	18 Unit	600.000.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	187.120.000	122.500.000	467.500.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	4 Unit	300.000.000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.000.000	270.000.000	276.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur	1 Unit	300.000.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahun	%		%	100 %	100 %	2.200.000.000	357.000.000	357.000.000					100 %	1.700.000.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	750.000.000	0	0					3 dokumen	800.000.000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000	0	0	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholde	2 Dokumen	600.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	1 Dokumen	200.000.000		
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.450.000.000	357.000.000	357.000.000					2 dokumen	900.000.000		
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	57.000.000	57.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	1 Dokumen	600.000.000		
2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000	300.000.000	300.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	1 Dokumen	300.000.000		
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%		%	61 %	61 %	6.190.254.708	400.000.000	400.000.000					61 %	3.281.900.000		
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara	lokas		lokas	17 lokasi	17 lokasi	3.846.028.868	310.000.000	310.000.000					17 lokasi	701.900.000		
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				31 Dokumen	31 Dokumen	1.698.968.368	100.000.000	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	31 Dokumen	350.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	577.060.500	10.000.000	10.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	1 Dokumen	350.000.000	
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				600 Dokumen	600 Dokumen	1.570.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	600 Dokumen	1.900.000	
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditanggulangi	lokasi		lokasi	17 lokasi	17 lokasi	907.760.000	70.000.000	70.000.000						17 lokasi	1.000.000.000	
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				5 Titik	5 Titik	258.690.000	70.000.000	70.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	5 Titik	250.000.000	
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	lokasi		lokasi	17 lokasi	17 lokasi	1.436.465.840	20.000.000	20.000.000						17 lokasi	1.580.000.000	
2 11 03 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1 Dokumen	1 Dokumen	305.807.700	20.000.000	20.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	1 Dokumen	320.000.000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%		%	10 %	10 %	5.302.000.850	107.000.000	107.000.000						10 %	2.100.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah kehati yang terkelola	lokasi		lokasi	2 lokasi	2 lokasi	5.302.000.850	107.000.000	107.000.000					2 lokasi	2.100.000.000	
2.11.04.2.01.01					1 Dokumen	1 Dokumen		5.152.306.000	66.500.000	66.500.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Simpenan, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Cikakak, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Cisolok, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Parakansalak, Semua KelurahanKab. Sukabumi, Cicurug, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Kabandungan, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Waluran, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Ciemas, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Surade, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Cibitung, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Ciracap, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Kadudampit, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Sukabumi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	1 Dokumen	1.700.000.000
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Ha	15 Ha	0	0	0		Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan		15 Ha	300.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
												Perubahan Iklim					
2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				80 Orang	80 Orang	149.694.850	40.500.000	40.500.000	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua KelurahanKab. Sukabumi, Simpenan, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Cikakak, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Cisolak, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Parakansalak, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Cicurug, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Kabandungan, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Waluran, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Ciemas, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Surade, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Ciracap, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Kadudampit, Semua Kelurahan Kab. Sukabumi, Sukabumi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholde	80 Orang	100.000.000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	N Persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola	%		%	1,73 %	1,73 %	1.809.640.000	50.000.000	50.000.000						1,73 %	700.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah TPS LB3 yang disetujui	unit		unit	20 unit	20 unit	1.809.640.000	50.000.000	50.000.000						20 unit	550.000.000
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	20 Laporan	298.569.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	20 Laporan	300.000.000
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							150.000.000
2 11 05 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan		5 Dokumen	150.000.000
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	%		4,33 %	4,33 %	2.555.430.000	84.142.000	84.142.000						4,33 %	3.100.000.000
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	Usaha/ Kegiatan		Usaha/ Kegiatan	145 Usaha/ Kegiatan	145 Usaha/ Kegiatan	2.555.430.000	84.142.000	84.142.000						145 Usaha/ Kegiatan	3.100.000.000
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				70 Dokumen	70 Dokumen	3.100.000.000	29.142.000	29.142.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholde	70 Dokumen	1.300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				75 Laporan	75 Laporan	1.035.630.000	55.000.000	55.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholde	75 Laporan	1.490.000.000	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	%		%	100 %	100 %	1.550.000.000	50.000.000	50.000.000						100 %	1.300.000.000	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang dibina	orang		orang	150 orang	150 orang	1.550.000.000	50.000.000	50.000.000						150 orang	1.300.000.000	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.550.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Sukabumi, Cisolok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder	3 Dokumen	1.300.000.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	%		%	5 %	5 %	1.690.342.750	49.999.900	49.999.900						5 %	1.800.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah individu/kelompok masyarakat yang dididik, dilatih dan mendapatkan penyuluhan lingkungan	orang		orang	202 orang	202 orang	1.690.342.750	49.999.900	49.999.900					202 orang	1.800.000.000	
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	181.993.000	49.999.900	49.999.900	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	3 Dokumen	135.000.000	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%		%	1,2 %	1,2 %	699.999.730	100.000.000	100.000.000					1,2 %	800.000.000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kategori penghargaan lingkungan yang diberikan	Kategori		Kategori	3 Kategori	3 Kategori	699.999.730	100.000.000	100.000.000					3 Kategori	800.000.000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr opi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr opi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	699.999.730	100.000.000	100.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	3 Entitas	800.000.000
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%		%	90 %	90 %	1.550.000.000	50.000.000	50.000.000					90 %	700.000.000	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditangani dan diselesaikan	Pengaduan		Pengaduan	25 Pengaduan	25 Pengaduan	1.550.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	25 Pengaduan	700.000.000	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang				25 Dokumen	25 Dokumen	1.550.000.000	50.000.000	50.000.000					25 Dokumen	700.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
		Ditindaklanjuti/Ditangan															
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	%	%	58,4 %	58,4 %	59.799.999.400	8.459.429.500	11.680.432.360					58,4 %	348.170.000.000	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola pada wilayah pelayanan	m3	m3	m3	1221.39 m3	1221.39 m3	59.799.999.400	8.459.429.500	11.680.432.360					1221.39 m3	347.930.000.000	
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1Dokumen	1Dokumen	296.750.000	0	0				Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	1Dokumen	850.000.000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				427 Ton	427 Ton	24.169.999.900	8.066.498.100	10.688.685.300	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	427 Ton	25.420.000.000
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				8 Kelompok	8 Kelompok	809.999.500	24.999.900	24.999.900	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	8 Kelompok	1.060.000.000
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				63 Unit	63 Unit	14.243.250.000	367.931.500	966.747.160	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Aparatur, masyarakat, stakeholder	63 Unit	320.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
2 11 11 2.02	Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta							0	0	0						140.000.000	
2 11 11 2.02 01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							0	0	0		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan			140.000.000	
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta							0	0	0						100.000.000	
2 11 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah							0	0	0		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan			100.000.000	
<b>TOTAL</b>								<b>83.609.913.748</b>	<b>29.600.096.434</b>	<b>35.050.038.290</b>						<b>412.403.050.000</b>	

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kegiatan taktis strategis sebagai landasan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2023 yang berisi tentang kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditentukan serta mengakomodir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, serta dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen seluruh unsur *stakeholder* yang terlibat.

Palabuhanratu, 18 Agustus 2023

KEPALA,



**Ir. Hj. TEJA SUMIRAT, M.M**  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19660330 199303 2 002